

**PERATURAN DESA GIRIKARTO**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIKARTO PADA**

**BADAN USAHA MILIK DESA BANGUN KARYA**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**DESA GIRIKARTO**

**KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**



**PERATURAN DESA GIRIKARTO**

**KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

**NOMOR 6 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIKARTO KEPADA**

**BADAN USAHA MILIK DESA “BANGUN KARYA”**

**TAHUN ANGGARAN 2020**

**KEPALA DESA GIRIKARTO,**

Menimbang : Bahwa dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya, perlu membuat peraturan tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girikarto pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya dengan menuangkan dalam Peraturan Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2007 tentang Investasi Pemerintah;

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemindahtanganan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementrian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

10. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girikarto Tahun 2015-2021, (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 2.);

11. Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2016 tentang Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya, (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2016 Nomor 5.);

12. Peraturan Desa Girikarto Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Girikarto Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 4.);

13. Peraturan Desa Girikarto Nomor 8 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 8);

|  |
| --- |
| 14. Peraturan Kepala Desa Girikarto Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Desa Girikarto Tahun 2018 Nomor 3); |
| 15. Peraturan Desa Girikarto Nomor 2 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girikarto Tahun 2019 Nomor 2); |

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRIKARTO

dan

KEPALA DESA GIRIKARTO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA GIRIKARTO PADA BADAN USAHA MILIK DESA

“ BANGUN KARYA “

BAB I

KETENTUAN UMUM

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Girikarto.

2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

4. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUM Desa adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

5. Kekayaan Desa yang dipisahkan adalah kekayaan Desa yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan/atau sumber-sumber lain yang sah untuk dijadikan penyertaan modal Pemerintah Desa pada BUM Desa*.*

6. Penyertaan Modal Pemerintah Desa adalah pengalihan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal atau saham desa pada BUM Desa.

7. Usaha Desa adalah jenis usaha yang berupa pelayanan ekonomi desa seperti, usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian, serta industri dan kerajinan rakyat.

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa

**BAB II**

**PENYERTAAN MODAL**

**Pasal 2**

Dengan Peraturan Desa ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girikarto pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya

**BAB III**

**TUJUAN**

**Pasal 3**

(1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girikarto sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian Desa dan peningkatan Pendapatan Asli Desa.

(2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girikarto dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

**BAB IV**

**BESARAN DAN SUMBER DANA DAN JANGKA WAKTU**

**Pasal 4**

(1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Desa Girikarto pada Badan Usaha Milik Desa Bangun Karya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sebesar Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah).

(2) Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diserahkan oleh Pemerintah Desa selama 2 (dua) tahap.

(3) Dana Penyertaan Modal tahap pertama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluhdua juta rupiah).

(4) Dana Penyertaan Modal tahap kedua sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) bersumber dari Dana Desa APB Desa Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima puluhdua juta rupiah).

**BAB V**

**KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Girikarto

.

Ditetapkan di : Girikarto

Pada tanggal : 9 Juli 2019

KEPALA DESA GIRIKARTO,

TUYADI

Diundangkan di : Girikarto

Pada tanggal : 9 Juli 2019

SEKRETARIS DESA

SUPARMAN

LEMBARAN DESA TAHUN 2019 NOMOR 6

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD GIRIKARTO**

**DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Selasa tanggal Sembilan Juli Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Girikarto dalam rangka membahas :

**Rancangan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Bangun Karya “**

**Desa Girikarto**

Rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Bangun Karya “, menjadi Peraturan Desa No 6 Tahun 2019 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa**

**kepada BUMDes “ Bangun Karya “**

**Desa Girikarto**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto  **SAMSI SWASANA** | Girikarto, 9 Juli 2019  Kepala Desa  **TUYADI** |

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA GIRIKARTO**

**PENETAPAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDes “ BANGUN KARYA “**

**DESA GIRIKARTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto  **SAMSI SWASANA** | Girikarto, 9 Juli 2019  Kepala Desa  **TUYADI** |

**BERITA ACARA**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD GIRIKARTO**

**DESA GIRIKARTO KECAMATAN PANGGANG**

**KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini ……………… tanggal ………………. Bulan …………….. Tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Balai Desa Girikarto Kecamatan Panggang Kabupaten Gunungkidul telah diadakan Rapat Pemerintah Desa Girikarto dalam rangka membahas :

**Pembahasan Peraturan Desa tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Bangun Karya “**

**Desa Girikarto**

Rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa dan BPD Desa Girikarto sebagaimana daftar hadir terlampir. Dalam rapat tersebut telah selesai dibahas dan diperoleh kata sepakat mengenai pokok – pokok hasil rapat bersama sebagai berikut :

**Menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Desa kepada BUMDes “ Bangun Karya “**

**Desa Girikarto**

Demikian Berita Acara rapat Pemerintah Desa Girikarto ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagimana mestinya.

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto  **SAMSI SWASANA** | Girikarto, ……………………….. 2019  Kepala Desa  **TUYADI** |

**DAFTAR HADIR**

**RAPAT PEMERINTAH DESA DAN BPD DESA GIRIKARTO**

**PEMBAHASAN PERATURAN DESA TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DESA KEPADA BUMDes “ BANGUN KARYA “**

**DESA GIRIKARTO**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **NAMA** | **JABATAN** | **ALAMAT** | **TANDA TANGAN** | |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| Ketua BPD Girikarto  **SAMSI SWASANA** | Girikarto, ……………………. 2019  Kepala Desa  **TUYADI** |